



Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Ririk Banowati Permanasari

## TPA Piyungan Ditutup, Kelola Sampah Butuh Dana Besar

Senjakala Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, tinggal menghitung hari. TPA yang berada di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, bakal resmi ditutup Pemprov DIY. Penutupan secara permanen berlaku p per 30 April 2024. Selama ini TPA Piyungan menampung sampah dari tiga daerah. Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul atau biasa disingkat Kartamantul.



RIRIK BANOWATI PERMANASARI

“Bagi kami mengelola sampah secara mandiri bukan sekadar membutuhkan partisipasi dan kesadaran warga. Tapi juga kesiapan infrastruktur dan dukungan sarana prasarana.”

**RIRIK BANOWATI PERMANASARI**  
 Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta

“PENUTUPAN secara permanen itu membuat Kota Jogja harus siap menjalankan desentralisasi pengelolaan sampah,” ucap Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Ririk Banowati Permanasari saat berbicara dalam acara talk show bertajuk “Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta” pada Jumat (22/3) lalu.

Ririk mengakui kewenangan penutupan berada di tangan Pemprov DIY. Wakil ketua DPRD Kota Yogyakarta periode 2014-2019 ini mengatakan, bila boleh mengusulkan, dia ingin pemprov memberikan kelonggaran. “Beri waktu kami agar siap dan bisa mengelola sampah secara mandiri,” katanya.

Ririk mengakui dengan luas wilayah yang relatif kecil 32 km persegi, produksi sampah dari Kota Jogja tergolong banyak. Rata-rata sampah yang dibuang ke TPA Piyungan mencapai 360 ton per hari. Saat sampah mulai menjadi masalah, sejak awal tahun lalu, pemkot menggalakan Gerakan Zero Sampah Anorganik.

Lewat gerakan itu mulai 1 Januari 2023, masyarakat Kota Jogja dilarang membuang sampah anorganik. Masyarakat diimbau mengelola sampah anorganik secara mandiri atau melalui bank sampah. Aturan nol sampah anorganik ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta No. 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik.

“Gerakan itu memang berhasil mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan. Tapi sebenarnya belum optimal



SUDAH Beroperasi: Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta, dilengkapi empat mesin gribik. Fungsinya memilah sampah rumah tangga organik dan anorganik.

sebagaimana yang kita harapkan,” ucap Ririk. Dikatakan, besarnya produksi sampah dari Kota Jogja bukan hanya berasal dari warganya. Namun ada juga yang dibuang oleh masyarakat yang tinggal di pinggiran yang berbatasan dengan Kota Jogja. Kembali soal pengelolaan sampah secara mandiri, Komisi C DPRD Kota Yogyakarta selalu mendukung program dan kegiatan yang diusulkan pemkot. Berbagai usulan yang diajukan tak pernah tidak disetujui. Bahkan pada 2023 lalu, secara

khusus, Komisi C mengadakan kajian tentang gerakan zero sampah anorganik sebagai gerakan berkelanjutan. Kajian itu sebagai bagian dari fungsi legislasi. Kajian sebagai masukan untuk pemkot khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta. Awal 2024 ini, Komisi C kembali mengadakan kajian menyangkut tata kelola infrastruktur pengelolaan sampah mandiri berkelanjutan.

“Bagi kami mengelola sampah secara mandiri bukan sekadar

membutuhkan partisipasi dan kesadaran warga. Tapi juga kesiapan infrastruktur dan dukungan sarana prasarana,” katanya.

Politisi yang tinggal di Baciro, Gondokusuman, ini mengakui sampah menjadi pekerjaan rumah (PR). Bukan hanya masalah pemkot. “Perseolan kita semua,” ingatnya. Mengelola sampah secara mandiri membutuhkan perubahan pola pikir. Menanggapi pertanyaan warga soal penutupan TPA Piyungan, Ririk kembali mengatakan keputusan berada di tangan pemprov. Kapasitas pemkot hanya menyampaikan ke masyarakat.

Sebelum ada kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah, sebenarnya pemkot setiap tahun berkontribusi dengan membayar retribusi ke pemprov sebesar Rp 2 miliar. Angka itu dengan perhitungan sampah yang dibuang ke TPA Piyungan per ton Rp 25 ribu. TA 2024 ini, dewan menyetujui kenaikan anggaran Rp 75 ribu per ton.

Ririk mengakui mengelola sampah secara mandiri membutuhkan anggaran besar. Bahkan bila melibatkan pihak ketiga harga satuannya bisa berlibat-libat lebih mahal. Setiap satu ton bisa menelan anggaran Rp 350 ribu hingga Rp 450 ribu. Dalam masa transisi, Komisi C telah menyetujui anggaran Rp 1 miliar untuk pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Di lapangan terjadi tersebut belum dapat dilaksanakan. Saat ini pemkot mengandalkan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di Nitikan dan Karangmiri. (kus/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005